DIDAKTIS Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Vol. 3 No. 2, September 2025; Page 67–76
E-ISSN 2986-5956; DOI: 10.33096/didaktis.v3i2.919

Relasi Kuasa dan Wacana Resistensi dalam Novel *Janji* Karya Tere Liye Perspektif Michel Foucault

Atika Suri Ramadani[1], Irma Satriani[2]

[1]Universitas Negeri Makassar; sylvaticaaa@gmail.com
[2]Universitas Negeri Makassar; irma.satriani@unm.ac.id

Article Info

Keywords:
power relations; discourse analysis; Michel Foucault; Tere Liye's Janji

Kata Kunci:
relasi kuasa; analisis wacana; Michel Foucault; *Janji* Tere Liye

Article History
Received: 2025-05-02
Reviewed: 2025-09-20
Accepted: 2025-09-30

Lisensi: cc-by-sa

Abstract

This study aims to analyze the forms and dynamics of power relations in Tere Liye's novel Janji *through Michel Foucault's theory of discourse and power. The research employs a qualitative method with a Foucauldian discourse analysis approach to examine how power operates, spreads, and produces truth within the novel's social context. The data consist of textual excerpts that illustrate elements of surveillance, discipline, and resistance. The findings reveal that power in* Janji *is not monolithic or merely repressive but rather productive and diffused across three major domains: mental control through normalization and surveillance, bodily discipline through social and institutional mechanisms, and social domination maintained through economic and symbolic power. On the other hand, acts of resistance emerge as counter-discourses performed by the main character, demonstrating that power always allows space for opposition and social transformation. The study concludes that* Janji *reflects the complexity of power relations that not only constrain but also shape individual identity, behavior, and awareness within social networks, emphasizing the importance of critical consciousness toward the mechanisms of power embedded in everyday life.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika relasi kuasa dalam novel *Janji* karya Tere Liye melalui perspektif teori wacana dan kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana Foucauldian untuk menelaah bagaimana kekuasaan beroperasi, menyebar, dan memproduksi kebenaran dalam konteks sosial yang tergambar di dalam novel. Data penelitian berupa kutipan-kutipan teks yang mengandung unsur pengawasan, disiplin, dan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam *Janji* tidak bersifat tunggal dan represif, melainkan produktif dan tersebar dalam tiga ranah utama, yaitu pengendalian pikiran melalui normalisasi dan pengawasan, disiplin tubuh melalui mekanisme sosial dan institusional, serta dominasi sosial yang dipertahankan melalui kekuatan ekonomi dan simbolik. Di sisi lain, muncul bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh tokoh utama sebagai wacana tandingan terhadap praktik kekuasaan yang menindas. Resistensi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan selalu membuka ruang bagi perlawanan dan perubahan sosial. Kesimpulannya, novel *Janji* merefleksikan kompleksitas relasi kuasa yang tidak hanya membatasi, tetapi juga membentuk identitas, perilaku, dan kesadaran individu dalam jejaring sosial, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran kritis terhadap mekanisme kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

Corresponding Author
Atika Suri Ramadani
Universitas Negeri Makassar; sylvaticaaa@gmail.com

How to Cite (APA)
Ramadani, A. S., & Satriani, I. (2025). Relasi Kuasa dan Wacana Resistensi dalam Novel Janji Karya Tere Liye Perspektif Michel Foucault. *DIDAKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 3*(2), 67-76. https://doi.org/10.33096/didaktis.v3i2.919

PENDAHULUAN

Karya sastra diciptakan oleh pengarang agar dapat dipahami, dihayati, diresapi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengarang merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, agama, maupun institusi di sekitarnya. Oleh karena itu, karya sastra dapat dipandang sebagai lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium

representasi sosial dan ideologis (Wellek & Warren, 2016; Narendra, Syarifuddin, & Fadlullah, 2024). Melalui bahasa, pengarang memproduksi makna, membangun pandangan dunia, dan merefleksikan struktur kekuasaan dalam masyarakat (Pratama, 2023; Siswadi, 2024). Dengan demikian, karya sastra bukan hanya media ekspresi estetik, melainkan juga arena dialektika antara individu dan masyarakat tempat ia berakar (Addina & Hanif, 2024).

Istilah postmodernisme pertama kali muncul pada 1870-an dan mulai berkembang secara teoretis pada pertengahan abad ke-20. Postmodernisme menolak kebenaran universal dan mengedepankan pluralitas makna, relativitas, serta dekonstruksi terhadap wacana dominan (Syafiqah, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan postmodern mendorong pembacaan teks sastra sebagai arena pergulatan antara ideologi dan interpretasi, antara struktur sosial dan kebebasan subjek (Satriani, 2016; Utama & Dinanti, 2024). Fiedler, salah satu kritikus modernisme, menyatakan bahwa modernitas telah mengalami kemunduran karena kembali munculnya antirasionalitas, romantisme, dan subjektivitas. Dengan demikian, postmodernisme membuka peluang bagi pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap kuasa dan pengetahuan yang tersembunyi di balik teks (Narendra et al., 2024; Rafillah, 2025).

Salah satu pemikir utama yang berpengaruh dalam teori postmodern adalah Michel Foucault. Foucault memandang kekuasaan tidak bersifat hierarkis atau represif semata, tetapi produktif dan tersebar dalam berbagai ranah kehidupan (Foucault, 2019; Poorghorban, 2023). Kekuasaan bekerja melalui mekanisme wacana, institusi, dan norma yang membentuk subjektivitas individu. Dalam konteks ini, bahasa menjadi instrumen utama dalam produksi pengetahuan dan kebenaran (*power/knowledge*), yang secara halus menata perilaku manusia (Foucault, 1980; Pratama, 2023). Pandangan ini sejalan dengan penelitian Rafillah (2025) yang menunjukkan bagaimana wacana kekuasaan dapat melanggengkan ketimpangan melalui institusi sosial, dan dengan Siswadi (2024) yang menegaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan ruang efektif bagi pembentukan pengetahuan dan normalisasi perilaku. Dengan demikian, analisis wacana Foucauldian menjadi alat penting untuk menelaah mekanisme sosial yang mengatur, mendisiplinkan, dan menormalisasi subjek dalam masyarakat (Andriani, 2024; Nasution, 2024).

Novel *Janji* karya Tere Liye mengisahkan tiga sekawan santri di sebuah pesantren yang ditugaskan mencari Bahar—seorang murid bermasalah dengan masa lalu kelam. Perjalanan ini tidak hanya menghadirkan tema persahabatan dan penebusan, tetapi juga memunculkan refleksi mendalam tentang hubungan antara individu dan sistem sosial yang mengatur perilakunya. Melalui perspektif Foucault, novel *Janji* dapat dibaca sebagai arena di mana kekuasaan, pengetahuan, dan resistensi saling berinteraksi dalam membentuk identitas para tokoh (Foucault, 2002; Latupeirissa & Tjahjono, 2021). Tokoh Bahar merepresentasikan subjek yang dikonstruksi oleh norma sosial dan institusional, tetapi juga menunjukkan perlawanan terhadap struktur tersebut melalui tindakan resistif. Resistensi ini sejalan dengan pandangan Foucault bahwa di mana ada kekuasaan, di situ selalu muncul perlawanan.

Kekuasaan dalam *Janji* tidak hadir secara monolitik, melainkan berlapis: melalui pengawasan moral, kontrol sosial, disiplin tubuh, serta dominasi ekonomi dan simbolik. Hal ini paralel dengan temuan Andriani (2024) yang menunjukkan bagaimana praktik kekuasaan di media bekerja melalui representasi halus dan normalisasi citra publik. Sementara itu, studi Addina dan Hanif (2024) menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat bersifat ambivalen—baik sebagai alat dominasi maupun pembebasan—tergantung pada konteks sosial dan kesadaran kritis individu. Dengan demikian, pembacaan Foucauldian terhadap *Janji* memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu bersifat dinamis, melahirkan pengetahuan sekaligus ruang resistensi.

Melalui perspektif analisis wacana Foucauldian, novel *Janji* merefleksikan kompleksitas relasi kuasa yang tidak hanya membatasi, tetapi juga membentuk kesadaran dan identitas individu. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai alat represi, melainkan sebagai mekanisme produktif yang mengatur kehidupan sosial dan membuka ruang bagi perlawanan simbolik. Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis terhadap mekanisme kekuasaan yang tertanam dalam praktik sosial dan budaya sehari-hari (Foucault, 2019; Poorghorban, 2023; Narendra et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana Foucauldian sebagai landasan utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dan struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa dan tindakan tokoh-tokoh dalam teks sastra. Data penelitian berupa kata, ungkapan, kalimat, dan peristiwa yang mengandung unsur pengawasan, disiplin, dominasi, serta bentuk resistensi terhadap kekuasaan. Sumber data utama adalah novel *Janji* karya Tere Liye, sedangkan sumber data pendukung berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan teori wacana dan kekuasaan Michel Foucault. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan intensif terhadap teks, penandaan bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian, serta pengelompokan data ke dalam kategori tematik sesuai rumusan masalah.

Analisis data dilakukan secara induktif dan interpretatif melalui tiga tahapan utama, yaitu pengorganisasian data, pemberian makna, dan penarikan kesimpulan. Setiap data yang ditemukan ditafsirkan dalam konteks relasi kuasa dan wacana sosial yang melatarbelakanginya. Proses analisis ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peristiwa dalam teks, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan bekerja, menyebar, dan menghasilkan kebenaran dalam narasi. Peneliti berperan aktif sebagai pembaca yang menafsirkan teks secara reflektif, dengan tetap menjaga konsistensi antara temuan dan konteks sosial yang digambarkan dalam novel. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyingkap mekanisme kekuasaan yang membentuk identitas dan perilaku tokoh, sekaligus menunjukkan ruang-ruang resistensi yang muncul sebagai bagian dari dinamika sosial dalam karya sastra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan ini menguraikan bagaimana relasi kuasa menurut Foucault tercermin dalam kehidupan penjara, baik melalui pengaturan pikiran, tubuh, maupun praktik kekuasaan yang tersebar dan berlapis. Analisis difokuskan pada contoh konkret dari novel, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus maupun represif, membentuk perilaku, norma, dan struktur sosial di dalam penjara.

Relasi Kuasa atas Pikiran

Relasi kekuasaan menurut Foucault (dalam Nasution, 2024), menjadi landasan kognitif masyarakat pada suatu masa tertentu, di mana masyarakat diatur, dikendalikan, dimanipulasi, dan didominasi oleh berbagai bentuk kekuasaan yang tersebar. Kekuasaan ini membentuk cara berpikir dan norma yang diikuti masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, sehingga pola pikir masyarakat secara kolektif mencerminkan pengaruh dan kepentingan para pemegang kekuasaan dalam konteks sosial tersebut. Kenyataan wacana tersebut tergambar ke dalam wacana berikut.

> Data 1:
> *Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah mengabaikan semuanya. Sipir lain kaya raya karena suap, aku tutup telinga. Kepala penjara mendapat transfer ratusan juta dari napi koruptor agar sel mereka disulap jadi mewah, aku tutup mata. Peduli setan, yang penting aku tidak melakukannya. Aku menjaga jarak dari hal-hal tersebut. Kenapa kau tidak bisa seperti itu, Bahrun? Tutup mata dan telingamu, kau tidak perlu harus berkelahi, apalagi membunuh napi lain demi prinsip yang kau yakini (Liye, 2021:210).*

Wacana data 1 menampilkan bagaimana kekuasaan dalam penjara tidak hanya berupa paksaan atau sensor, melainkan juga bersifat produktif dan membentuk realitas sosial yang baru, di mana para sipir dan kepala penjara yang korup menghasilkan praktik-praktik normalisasi dan pembenaran atas korupsi dan kekerasan demi mempertahankan posisi mereka dalam jaringan kekuasaan. Sikap "tutup mata dan telinga" yang dianjurkan kepada Bahrun mencerminkan bagaimana kekuasaan Foucault beroperasi melalui produksi norma dan ritual kemerdekaan semu, di mana individu diarahkan untuk menginternalisasi kontrol dan menghindari perlawanan langsung demi kelangsungan sistem kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan di sini bukan sekadar represi, melainkan juga menghasilkan domain objek (korupsi, suap, kekerasan antar napi) dan

ritual sosial yang membentuk perilaku dan identitas para pelaku di dalam penjara, menciptakan realitas di mana ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi bagian dari "normalitas" yang diproduksi secara terus-menerus dalam institusi tersebut. Kenyataan lainnya tergambar ke dalam wacana di bawah ini.

Data 2:
Kau tahu sendirilah sipir senior itu. Dia tidak perlu alasan buat memukuli tahanan. Kesal melihat wajah napi, dia mukul. Suasana hatinya sedang buruk, dia mukul. Di rumah habis diomeli istrinya, dia mukul. Ringan kali tangannya' (Liye, 2021:229).

Wacana data 2 menggambarkan kekuasaan sipir senior yang menggunakan kekerasan fisik secara sewenang-wenang tanpa alasan jelas, mencerminkan kekuasaan yang bersifat represif dan langsung. Namun, sesuai dengan pandangan Foucault (2007), kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan terbuka, melainkan juga dijalankan secara terselubung melalui mekanisme pengawasan dan disiplin yang halus dalam institusi seperti penjara. Kekerasan fisik yang dilakukan sipir adalah manifestasi kekuasaan yang nyata dan kasar, namun di balik itu terdapat kekuasaan terselubung yang mengatur perilaku napi dan sipir melalui norma, aturan, dan pengawasan yang terus-menerus, menciptakan struktur dominasi yang kompleks. Dengan demikian, kekuasaan dalam penjara bukan hanya soal tindakan represif yang eksplisit, tetapi juga kekuasaan yang tersembunyi dan produktif yang mengorganisasi hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, sesuai dengan konsep Foucault tentang kekuasaan yang direpresentasikan melalui kekerasan dan tindakan terselubung.

Relasi Kuasa atas Tubuh

Foucault (dalam Nasution, 2024) membagi politik tubuh menjadi tubuh sosial, yang diatur melalui kebijakan dan manipulasi perilaku agar patuh dalam sistem sosial, dan tubuh seksual, yang dikontrol secara mikro oleh keluarga dan sekolah, serta makro oleh negara melalui regulasi. Biopolitik mengatur populasi melalui intervensi biologis seperti kelahiran dan kesehatan, sementara anatomo-politik mengatur tubuh individu sebagai mesin produktif melalui disiplin dan pengawasan, menjadikan tubuh media utama kekuasaan. Wacana di bawah ini termasuk ke dalam relasi kuasa atas tubuh sosial, berikut kenyataan yang tergambar ke dalam wacana berikut.

Data 3:
Dasar Bahar sialan, jika aku tahu sejak awal dia masuk penjara, aku bisa membebaskannya. Aku mengira dia takut bertemu denganku lagi, atau malah membenciku, pergi begitu saja, tidak mau ditemukan (Liye, 2021:166).

Wacana data 3 menunjukkan di mana Bos Acong menyesali ketidaktahuannya tentang situasi Bahar yang masuk penjara, mencerminkan dinamika relasi kuasa dalam perspektif Foucault. Menurut Foucault (2002), kuasa tidak dimiliki oleh individu tertentu (seperti Bos Acong), melainkan dipraktikkan melalui jaringan relasi sosial yang kompleks. Ketidakmampuan Bos Acong untuk "membebaskan" Bahar bukan sekadar kegagalan personal, tetapi menunjukkan bagaimana kuasa bekerja dalam ruang sosial penjara dan jaringan di luarnya-tempat kontrol, informasi, dan keputusan terdistribusi secara tidak merata. Penyesalan Bos Acong justru mengungkap bahwa kuasa bersifat produktif dan cair: ia muncul dari interaksi, ketidaktahuan, serta pengetahuan yang terbatas, bukan dari otoritas mutlak. Dalam konteks ini, penjara sebagai institusi menjadi "ruang sosial" di mana kuasa beroperasi melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan pembentukan subjektivitas Bahar sebagai mantan narapidana. Kenyataan lainnya tergambar ke dalam relasi kuasa atas tubuh seksual.

Data 4:
Sejak dia masuk penjara, dia tahu, ada banyak napi yang memiliki kelainan seksual. Di sel-sel, dia sering mendengarnya. Mereka melakukannya malam hari. Bukan urusannya jika itu dilakukan suka sama suka. Tapi napi yang diseret itu jelas sedang dipaksa (Liye, 2021:201-202).

Wacana data 4 menggambarkan situasi seksual di dalam penjara, khususnya adanya praktik seksual yang dipaksakan, Foucault menegaskan bahwa diskursus dalam domain seksualitas adalah salah satu dari empat ranah yang berbahaya karena selalu terkait dengan relasi kekuasaan yang kompleks dan berubah-ubah sesuai konteks sosial tertentu. Dalam konteks penjara, kekuasaan tidak hanya hadir secara formal melalui aturan dan pengawasan, tetapi juga secara tersebar dalam praktik praktik sosial di dalam sel, termasuk praktik seksual yang dipaksakan tersebut. Diskursus tentang seksualitas di penjara ini bukan hanya soal hasrat, tetapi juga soal dominasi dan resistensi, di mana kekuasaan beroperasi dari bawah ke atas dan melibatkan subjek yang menjadi objek kekuasaan sekaligus pelaku resistensi. Oleh karena itu, fenomena pemaksaan seksual dalam penjara bukan hanya persoalan moral atau kriminal, tetapi juga manifestasi dari bagaimana kekuasaan dan pengetahuan tentang seksualitas dibentuk, dikontrol, dan dipertaruhkan dalam ruang sosial yang penuh ketegangan ini. Diskursus tersebut berbahaya karena mengungkap bagaimana kekuasaan menstrukturkan hubungan sosial dan seksual, sekaligus menimbulkan efek represif dan opresif yang melekat pada narapidana sebagai subjek kekuasaan.

Data 5:
Iya, itu kelainan seksual. Tapi mau dikata apa? Bertahun-tahun di dalam penjara yang isinya semua laki-laki, membuat napi membutuhkan pelampiasan seksual. Bagi napi yang punya istri, dia bisa mendapatkan kunjungan, dan penjara akan memfasilitasinya, tapi itu bayar semua. Bayar untuk meminjam ruangan, fasilitas, bayar ini, bayar itu. Bagi yang tidak punya istri, sipir juga bisa menyediakan wanita dari luar. Apalagi yang ini, bayar lebih mahal lagi. Bagi yang tidak punya uang, maka mereka melakukan hal lain untuk melampiaskannya. Dan kadang itu sangat menyimpang. Ada banyak napi yang begitu (Liye, 2021:206).

Wacana tersebut, menggambarkan bagaimana kebutuhan seksual narapidana di penjara dipenuhi melalui berbagai mekanisme yang melibatkan pembayaran dan pengaturan oleh sipir, serta praktik seksual yang menyimpang bagi yang tidak memiliki akses finansial. Fenomena ini mencerminkan praktik kuasa yang tidak dimiliki secara individu, melainkan dipraktikkan dalam ruang sosial penjara di mana relasi kuasa bekerja secara kompleks dan tersebar. Menurut Foucault (2002), kuasa beroperasi bukan sebagai milik pribadi, tetapi melalui jaringan hubungan sosial yang membentuk perilaku dan identitas individu dalam institusi seperti penjara. Dalam konteks ini, pengaturan seksual di penjara bukan hanya soal kebutuhan biologis, melainkan juga wujud strategi kuasa yang mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan tubuh narapidana melalui mekanisme ekonomi dan sosial yang tersirat, termasuk kontrol sipir dan ketergantungan napi pada sistem tersebut. Dengan demikian, kuasa bekerja secara mikro dalam ruang penjara, membentuk dan membatasi kebebasan napi sekaligus memproduksi norma dan praktik seksual yang terkontrol.

Unsur Kekuasaan

Foucault (dalam Nasution, 2024) menerangkan bahwa kekuasaan bukan sebagai dominasi, melainkan relasi beragam dan tersebar dalam jaringan sosial, yang dipengaruhi oleh unsur *powerfull-powerless, state-society,* dan dominan-marginal. Kekuasaan adalah strategi yang melanggengkan relasi kekuatan tanpa hierarki tetap, muncul dalam interaksi negara dan masyarakat, serta diproduksi terus menerus dalam setiap relasi sosial antara kelompok dominan dan marginal, memengaruhi pemikiran dan tubuh melalui berbagai bentuk kontrol. Kenyataan tersebut tergambar ke dalam wacana berikut.

Data 6:
Kami butuh akses ke penjara kota, Pak. Atau lebih tepatnya, siapa pun yang bisa memberikan informasi apa yang terjadi pada Bahar setelah dia menyerahkan diri ke kantor polisi.' Bos Acong mengangguk, meraih telepon genggam. 'Aku akan mengaturnya. Itu hanya butuh satu panggilan telepon (Liye, 2021:167-168).

Wacana data 6 menggambarkan bagaimana Bos Acong berusaha mengakses informasi dan kontrol atas situasi Bahar melalui jaringan kekuasaan yang dimiliki, yakni dengan melakukan satu panggilan telepon untuk mendapatkan akses ke penjara kota. Hal ini mencerminkan praktik kuasa yang tidak hanya terpusat pada individu, tetapi terjalin dalam jaringan sosial dan institusional yang lebih luas, seperti negara dan aparat penegak hukum. Pandangan Foucault (2002) menegaskan bahwa negara adalah superstruktur yang menginvestasikan kuasa ke dalam berbagai jaringan kekuasaan yang mengatur tubuh, seksualitas, keluarga, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks ini, akses Bos Acong ke penjara dan informasi tentang Bahar menunjukkan bagaimana negara dan institusinya menjadi arena praktik kuasa yang mengendalikan dan memonitor individu melalui jaringan tersebut, sehingga kuasa tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk relasi sosial dan kontrol atas subjek seperti Bahar. Kenyataan lainnya tergambar ke dalam wacana di bawah ini.

Data 7:
Bahrun belajar dengan cepat. Dia tahu siapa itu penguasa ruangan atau sel yang disebut "brengos". Di atas nya ada lagi penguasa blok alias foreman alias voorman. Semua urusan bisa diselesaikan jika punya OT (kode uang di penjara). Bahkan untuk mandi pun, jika punya OT, urusan lebih lancar. Mandi dengan air penjara bisa membuat tubuh gatal-gatal. Punya uang, kalian bisa mandi dengan air galon spesial. Tapi Bahrun lebih banyak menutup mulut, diam. Memperhatikan (Liye, 2021:180).

Berdasarkan wacana data 7 tentang Bahrun yang mengenali hierarki kekuasaan di penjara dan peran uang (OT) sebagai alat untuk mengakses berbagai kemudahan sangat sesuai dengan pandangan Foucault (2019) bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh satu pihak saja, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial yang saling berkaitan secara strategis. Dalam konteks penjara, kekuasaan beroperasi melalui berbagai posisi *brengos*, *foreman*, dan lain-lain yang membentuk struktur disipliner di mana individu diawasi, dikontrol, dan dinormalisasi sesuai aturan yang berlaku. Kepemilikan OT menjadi simbol bagaimana kekuasaan juga berwujud dalam bentuk pengetahuan dan sumber daya yang memungkinkan seseorang mengatur tubuh dan perilaku dalam ruang tertutup tersebut. Bahrun yang memilih diam dan mengamati mencerminkan internalisasi pengawasan dan kekuasaan yang membuatnya menjadi subjek yang patuh sekaligus adaptif dalam sistem tersebut.

Data 8:
Blok F tempat narapidana korupsi, pejabat penerima suap, dan lain-lain. Ada kandang burung kakatua, burung jalak, ada kandang iguana, ular, juga akuarium besar berisi arwana, akuarium kecil berisi ikan hias. Bukan main! Burung-burung di "kebun binatang" itu berisik setiap pagi, seolah menyambut pemiliknya bangun tidur dan memang itulah alasan si pemilik membawa hewan-hewannya, dia mau sel penjara-nya seperti rumahnya. Itu tidak sulit. Semua bisa diurus asalkan napi punya uang (Liye, 2021:189).

Wacana data 8 menggambarkan bagaimana narapidana korupsi yang memiliki uang dapat mengubah sel penjara menjadi seperti rumah mewah dengan fasilitas hewan peliharaan eksotik, menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan dominasi di dalam penjara yang seharusnya menjadi tempat hukuman yang setara bagi semua napi. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault (2019) bahwa kekuasaan adalah relasi dominasi di mana ada yang menguasai dan ada yang dikuasai; dalam konteks ini, napi korupsi yang memiliki modal finansial mampu menguasai sistem penjara melalui praktik suap dan kolusi dengan petugas, sehingga mereka mendapatkan perlakuan istimewa yang menegaskan dominasi mereka atas napi lain dan bahkan institusi penjara itu sendiri.

Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya berupa kepemilikan atau hak istimewa yang statis, melainkan jaringan relasi yang tersebar dan produktif, yang dalam kasus ini terlihat dari bagaimana kekuasaan narapidana korupsi beroperasi secara tersembunyi dan memanipulasi mekanisme pengawasan dan disiplin di penjara untuk keuntungan pribadi,

menjadikan penjara sebagai ruang di mana dominasi dan ketidakadilan sosial diproduksi dan direproduksi. Dengan demikian, kekuasaan di penjara bukan hanya soal pengawasan dan penindasan oleh negara, tetapi juga melibatkan praktik-praktik korupsi yang memperkuat posisi penguasa di dalamnya, menciptakan ketimpangan yang mencolok antara yang menguasai dan yang dikuasai.

Data 9:
Ada 700 lebih narapidana di penjara itu. Semua mendapat remisi, kecuali Bahrun. Itu disengaja oleh sipir senior. Mereka kesal melihat Bahrun. Tidak bisa menyakitinya secara fisik, mereka melakukannya dengan cara lain. Apa sebenarnya remisi? Kenapa napi diberikan remisi? Itu sebenarnya fungsi "pemasyarakatan" penjara. Napi yang berkelakuan baik mendapatkan apresiasi potongan masa tahanan, agar mereka termotivasi terus bersikap baik, hingga keluar penjara, kembali menjadi bagian masyarakat yang baik (Liye, 2021:221).

Wacana data 9 menggambarkan fungsi remisi sebagai bentuk pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik sebagai insentif untuk memotivasi perilaku positif dan mempercepat reintegrasi sosial mereka. Namun, dalam kasus Bahrun, penolakan remisi oleh sipir senior menunjukkan bagaimana kekuasaan juga dapat dipraktikkan secara strategis untuk mengontrol dan menghukum secara tidak langsung melalui mekanisme institusional. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault (2019) bahwa kekuasaan bukanlah milik satu pihak semata, melainkan praktik yang tersebar dalam relasi sosial dan institusi yang menciptakan norma serta pola perilaku tertentu.

Remisi sebagai "ritual kebenaran" dan alat pemasyarakatan merefleksikan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan dan aturan yang dilegitimasi oleh aparat seperti sipir dan administrasi penjara, yang sekaligus memproduksi realitas narapidana sebagai subjek yang harus tunduk dan patuh dalam sistem tersebut. Dengan demikian, pemberian atau penolakan remisi bukan sekadar soal hukum, tetapi juga wujud konkret praktik kekuasaan yang mengatur dan menormalisasi perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Resistensi

Resistensi adalah sikap atau tindakan bertahan, melawan, menentang, atau beroposisi terhadap kekuasaan. Menurut Foucault, perlawanan ini sering muncul dalam berbagai relasi sosial, meskipun tidak selalu didasarkan pada ideologi atau pemahaman yang jelas (dalam Nasution, 2024). Kenyataan wacana tersebut tergambar ke dalam wacana di bawah ini.

Data 10:
Apa pasal? Sederhana. Bahrun membuat tahanan baru tidak perlu membayar uang tempat di ruang penampungan. Saat brengos mau memungut uang, Bahrun mengajaknya berkelahi. Jadilah, tidak ada pungutan. Masalahnya, uang yang dipungut penguasa ruang penampungan itu juga harus disetor ke sipir. Terhenti setoran, sipir mencari biang keroknya (Liye, 2021:182).

Wacana tersebut memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dalam penjara tidak hanya berjalan satu arah, melainkan selalu membuka ruang bagi perlawanan, sebagaimana dinyatakan Foucault, bahwa di mana ada kekuasaan, pasti ada perlawanan. Tindakan Bahrun yang menolak pungutan liar dan menghadapi penguasa ruang penampungan merupakan bentuk perlawanan spontan dan tak kenal kompromi terhadap praktik korupsi dan dominasi yang telah terlembaga dalam sistem penjara. Perlawanan ini tidak hanya mengganggu aliran kekuasaan yang selama ini berjalan dari napi ke penguasa ruang hingga sipir tetapi juga menantang tatanan disipliner yang sudah dianggap normal oleh institusi penjara. Menekankan bahwa perlawanan bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang liar, hasil persekongkolan, atau bahkan pengorbanan, sebagaimana ditunjukkan Bahrun yang rela berkelahi demi prinsip, menandakan bahwa kekuasaan selalu bersifat dinamis dan tidak pernah absolut, karena selalu ada potensi resistensi di dalamnya. Kenyataan lainnya tergambar ke dalam wacana di bawah ini.

Data 11:

Pintu penghubung blok-blok lain mendadak ikut terbuka. Bagai air bah, mengalir ratusan napi dari Blok A hingga G. Semua memutuskan membela Bahrun. Kecuali Blok. F, napi koruptor itu menutup pintu sel mewah mereka rapat-rapat. Termasuk kebun binatang mini, sejak sore diamankan ke dalam sel, takut terkena imbas keributan. Tapi blok lain, mereka akhirnya memutuskan membantu Bahrun. Berseru-seru. Bersorak-sorai. Apa pun yang bisa dibawa dan dijadikan senjata teracung tinggi (Liye, 2021:250-251).

Wacana tersebut menggambarkan solidaritas dan perlawanan ratusan napi dari berbagai blok yang bersatu membela Bahrun saat terjadi keributan menunjukkan manifestasi nyata dari konsep Foucault (2019), bahwa di mana ada kekuasaan, di situ pasti ada perlawanan. Dalam konteks penjara yang sarat dengan struktur kekuasaan represif dari sipir dan sistem, tindakan kolektif para napi ini merupakan bentuk resistensi terhadap dominasi dan penindasan yang mereka alami. Bahrun, sebagai tokoh yang berani melawan praktik jahat dan ketidakadilan di penjara, menjadi simbol pusat perlawanan yang memicu solidaritas massa. Perlawanan ini bukan hanya reaksi spontan, tetapi juga strategi kuasa balasan yang muncul dalam ruang sosial yang sama di mana kekuasaan bekerja dan mengawasi. Dengan demikian, kerumunan napi yang bersorak dan mengangkat senjata adalah ekspresi dinamis dari hubungan kuasa yang terus-menerus berproses antara dominasi dan resistensi, memperkuat pemahaman Foucault bahwa kekuasaan selalu menimbulkan perlawanan sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam *Janji* karya Tere Liye sejalan dengan pandangan Foucault tentang kekuasaan yang tidak tunggal, melainkan menyebar melalui berbagai praktik sosial, simbolik, dan institusional. Di dalam penjara, kekuasaan beroperasi melalui sistem pengawasan, normalisasi, dan mekanisme disiplin yang membentuk perilaku serta pola pikir narapidana. Kekuasaan tersebut tampak tidak memaksa secara langsung, namun justru bekerja melalui kebiasaan dan norma yang dianggap wajar. Temuan ini menguatkan pandangan Foucault bahwa kekuasaan tidak selalu menindas, tetapi juga produktif karena menciptakan tatanan sosial dan pengetahuan baru yang mengatur kehidupan sehari-hari. Hal ini senada dengan hasil kajian Rafillah (2025) dan Narendra et al. (2024), yang menunjukkan bahwa wacana kekuasaan sering hadir dalam bentuk pengawasan dan pembenaran moral yang menata kesadaran individu.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa di dalam setiap struktur kekuasaan selalu ada potensi resistensi. Dalam novel *Janji*, tindakan Bahrun dan napi lain yang menentang ketidakadilan menunjukkan adanya ruang bagi subjek untuk menegosiasikan dan bahkan menolak dominasi yang membelenggu mereka. Perlawanan ini menggambarkan bahwa kekuasaan tidak pernah mutlak, melainkan terus dinegosiasikan dalam interaksi sosial yang dinamis. Sebagaimana dikemukakan Addina & Hanif (2024), kekuasaan dapat menjadi sarana pembebasan jika disadari dan dihadapi secara kritis. Dengan demikian, novel *Janji* bukan hanya menghadirkan potret relasi kuasa yang kompleks di ruang penjara, tetapi juga membuka refleksi tentang mekanisme sosial yang membentuk dan membatasi kebebasan manusia, sekaligus peluang bagi kesadaran kritis dan transformasi diri (Foucault, 2019; Andriani, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap relasi kuasa dalam novel *Janji* karya Tere Liye, dapat disimpulkan bahwa penjara dalam novel ini menjadi ruang yang merepresentasikan kompleksitas kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault. Kekuasaan tidak tampak sebagai kekuatan tunggal yang menindas secara langsung, melainkan hadir dalam berbagai bentuk yang halus dan berlapis. Pertama, relasi kuasa atas pikiran terwujud melalui proses normalisasi terhadap praktik korupsi dan kekerasan yang mendorong individu untuk menyesuaikan diri dan menghindari perlawanan terbuka. Kedua, relasi kuasa atas tubuh hadir melalui mekanisme pengawasan, kontrol perilaku, serta pengaturan seksualitas yang menjadikan tubuh narapidana sebagai objek kekuasaan. Ketiga, unsur kekuasaan tampak melalui praktik dominasi ekonomi dan sosial yang melibatkan aparat penjara, di mana uang dan posisi menjadi instrumen baru dalam mempertahankan hierarki dan privilese.

Secara keseluruhan, *Janji* menggambarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak hanya represif, tetapi juga produktif karena mampu membentuk realitas sosial, identitas, dan tatanan moral di dalam sistem penjara. Di tengah struktur kekuasaan yang ketat, novel ini juga menunjukkan adanya ruang bagi resistensi—melalui tokoh-tokoh yang menolak ketidakadilan dan berusaha mempertahankan martabatnya di dalam sistem yang menindas. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan selalu membuka peluang bagi perlawanan, sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Foucault. Dengan demikian, kesadaran kritis terhadap cara kerja kekuasaan menjadi penting, tidak hanya untuk memahami mekanisme sosial yang membentuk perilaku manusia, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang lebih adil, manusiawi, dan reflektif terhadap praktik kekuasaan dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

REFERENSI

Addina, N., & Hanif, M. (2024). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2*(1), 34–47. https://doi.org/10.31004/fdswm377

Andriani, I. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Foucault dalam Berita "Tangis Goenawan Mohamad dan Ambisi Kekuasaan Jokowi" pada Kompas.com. *Sitasi Ilmiah, 2*(1), 40–49. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/si/article/view/8252

Foucault, M. (2002). *The Archaeology of Knowledge.* London: Routledge.

Foucault, M. (2019). *Power: The Essential Works of Michel Foucault 1954–1984.* London: Penguin Books.

Latupeirissa, E., & Tjahjono, T. (2021). Relasi Kekuasaan, Pengetahuan dan Moral Tokoh Bujang dalam Novel Pulang Karya Tere Liye (Kajian Relasi Kuasa Michel Foucault). *Sastranesia, 9*(4), 17–29. https://doi.org/10.32682/sastranesia.v9i4.2195

Liye, T. (2021). *Janji*. Depok: Sabak Grip Nusantara.

Lulyastuti, L., & Satriani, I. (2025). Relasi Kuasa dalam Novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong Karya Eka Kurniawan: Perspektif Michael Foucault. *DIDAKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *3*(1), 1-8. https://doi.org/10.33096/didaktis.v3i1.789

Narendra, B. N., Syarifuddin, R., & Fadlullah, Y. A. (2024). Analisis Wacana Kritis: Teori dan Metode Kerangka Sosial dan Sastra. *Jurnal Deiksis, 4*(1), 44–60. https://pusdig.my.id/dieksis/article/view/396

Nasution, S. Y. (2024). Relasi Kuasa dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3*(1), 196–216. https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/832

Poorghorban, Y. (2023). On Michel Foucault: Power/Knowledge, Discourse, and Subjectivity. *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 17*(2), 318–328. https://doi.org/10.19105/ojbs.v17i2.9749

Pratama, R. A. (2023). Pemikiran Foucault dan Baron: Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Pendidikan dan Bahasa. *Jurnal Filsafat Indonesia, 4*(1), 45–57. https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543

Rafillah, R. A. (2025). Wacana Kuasa ala Foucault atas Peran Negara dan Institusi dalam Melanggengkan Ketimpangan Kuasa pada Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pontang, Serang. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2*(5), 1–22. : https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5177

Satriani, I. (2016). Postmodernisme dalam Novel Bilangan Fu Karya Ayu Utami. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 9*(1), 25–32. https://doi.org/10.26858/retorika.v9i1.3790

Siswadi, G. A. (2024). Relasi Kuasa terhadap Konstruksi Pengetahuan di Sekolah Perspektif Michel Foucault dan Refleksi atas Sistem Pendidikan di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru, 5*(1), 1-15. https://doi.org/10.25078/sa.v5i1.3405

Syafiqah, S. (2023). Postmodernisme dalam Novel Rantai Renjana Karya Niken Aqueensha. *Totobuang, 11*(2), 231–242. https://doi.org/10.26499/totobuang.v11i2.469

Utama, N. G., & Dinanti, P. A. (2024). The Depiction of Power Relations in Wish (2023) Through Foucauldian Perspective. *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 5*(3), 188-197. https://doi.org/10.51878/language.v5i3.6526

Wellek, R., & Warren, A. (2016). *Teori Kesusastraan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.